



Dugaan Korupsi PD Parkir Kota Denpasar Penyidik Jadwal Ulang Pemeriksaan Rai Mantra

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi PD Parkir Kota Denpasar. Selain itu, penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Walikota Denpasar, IB Rai D Mantra.

Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, IGA Kusumayasa Diputra mengatakan untuk kasus dugaan korupsi PD Parkir Kota Denpasar yang sudah menetapkan Dirut PD Parkir, Nyoman Gede Sudiantara terus dilanjutkan. Pada Selasa (22/1) lalu penyidik kembali memeriksa salah satu Kepala Cabang BPD.

"Selasa (24/1) kemarin sudah diperiksa salah satu kepala cabang BPD. Tapi saya lupa namanya," jelas Kusumayasa pada, Kamis (26/1). Pemeriksaan ini sendiri terkait keberadaan rekening milik PD Parkir. Namun jaksa asal Marga, Tabanan ini enggan membeber lebih lanjut soal materi pemeriksaan dengan alasan bisa mengganggu jalannya penyidikan. "Masih ada saksi dari BPD yang akan dipanggil bersama saksi lainnya," bebernya.

Terkait pemanggilan Walikota Denpasar, Rai Mantra yang sempat mangkir pada panggilan pertama, Kusumayasa menegaskan akan segera melakukan pemanggilan ulang. Namun belum diketahui kapan orang nomor satu di

Denpasar ini akan diperiksa. "Nanti setelah ada jadwal akan kami informasikan," pungkasnya.

Dalam penyidikan sebelumnya disebutkan, Nyoman Gede Sudiantara yang menjabat Dirut PD Parkir diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan uang PD Parkir senilai Rp 6 miliar. Selain itu, politisi PDIP ini juga dituding menyalahi aturan terkait penempatan uang asuransi PD Parkir.

Penempatan uang asuransi Rp 500 juta ini diduga bermasalah karena dikelola oleh Koperasi PD Parkir. Dari perhitungan penyidik, penempatan uang asuransi ini telah dilakukan sejak 9 tahun lalu.

Kalau dihitung per tahunnya ada Rp 500 juta, berarti sampai saat ini ada kerugian negara sekitar 4,5 miliar dalam penempatan asuransi ini. Berdasarkan perhitungan itulah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya mengumumkan Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Kota Denpasar, I Nyoman Gede Sudiantara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh PD Parkir. Pengumuman status tersangka Dirut PD Parkir ini disampaikan mantan Kajari Denpasar, Imanuel Zebua usai melakukan serah terima jabatan kepada Kajari Denpasar yang baru, Erna Normawati Widodo Putri di Kejati Bali pada, Senin (20/6/2016) lalu. rez

Edisi : Jumat 27 Jan 2017

Hal : 5



Gabeng, Pembayaran Utang Pemkab ke Rekanan Rp 46 M

AMLAPURA, NusaBali

Pembayaran utang Pemkab Karangasem ke sejumlah rekanan senilai Rp 46 miliar untuk pelaksanaan proyek fisik tahun 2016, masih gabeng. Padahal Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi menyarankan eksekutif segera menyusun draf APBD Perubahan 2017, untuk bayar utang itu. Kenyataannya, draf itu belum tersusun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Karangasem I Nengah Toya mengakui, belum menyusun draf APBD Perubahan 2017. "Karena kami masih mendata dan verifikasi utang Pemkab Karangasem," ujarnya di Amlapura, Kamis (26/1).

Ia mengakui, Ketua DPRD I Nengah Sumardi mendesak eksekutif agar secepatnya menyusun draf APBD Perubahan 2017, agar utang segera terbayar. Jangan sampai, utang tertunda pembayarannya hingga tiga bulan ke depan, bisa mengancam rekanan, jadi bangkrut. "Kami belum bisa pastikan, kapan tuntas melakukan verifikasi, kapan draf APBD Perubahan 2017 tuntas tersusun," kata I Nengah Toya.

Utang itu berasal dari dua kelembagaan yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Dua lembaga ini memiliki proyek fisik, sempat terlambat pengerjaannya dengan biaya DAK (dana alokasi khusus). Gara-gara DAK ditarik pusat tahun 2016 Rp 46 M, proyek yang terlanjur dikerjakan iut,

belum bisa dibayar Pemkab.

Rencananya, utang tersebut dibayar menggunakan dana SILPA (sisa lebih penggunaan tahun anggaran) APBD 2016, Rp 118 miliar. Proyek fisik yang belum dibayar untuk Dinas Kesehatan Karangasem Rp 11 miliar. Proyek dimaksud, Puskesmas Manggis I, Puskesmas Manggis II, Gedung Farmasi dan Gedung Puskesmas Bebandem.

Sedangkan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem yang belum membayar Rp 35 miliar untuk proyek bina marga, beberapa ruas jalan.

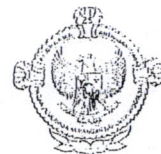
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumardi menyarankan pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang punya utang menyusun RKA (rencana kerja anggaran) ulang. Selanjutnya di APBD Perubahan 2017 nantinya dialokasikan dana untuk bayar utang di OPD yang berutang. Sehingga dana APBD 2017 terpangkas Rp 46 miliar, diambilkan dari SILPA yang tersedia Rp 118 miliar.

Dengan itu, praktis anggaran di APBD 2017 terpangkas Rp 46 miliar, sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya kegiatan Rp 46 miliar.

Kadis PU Karangasem I Nyoman Sutirtayasa mengaku terus ditanya rekanan kepastian utang terbayar. "Saya tetap kasi penjelasan, agar bersabar menunggu masih dalam proses," kata Sutirtayasa. **k16**

Edisi : Jumat, 27 Jan 2017

Hal : 8



Pemprov Ancam Tarik Kembali Bantuan Hibah

★ Sekwan Kerahkan Tim 109 Kejar LPJ Hibah

DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali ancam akan tarik kembali bantuan dana hibah yang sudah dicairkan, jika penerima bansos tahun anggaran 2016 tersebut tidak setor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pemprov Bali memberi deadline hingga 31 Januari 2017 besok bagi penerima bansos untuk setor LPJ hibah.

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, IB Ngurah Arda, mengatakan jika deadline setor LPJ hibah dilanggar, maka dana bansos yang sudah dicairkan sebelumnya otomatis ditarik kembali "Kalau tidak ada LPJ, berarti kan dana hibah tidak digunakan. Kita akan cek di rekeningnya. Kalau tidak digunakan, kita ambil lagi dengan kerjasama

BPD Bali Cabang terdekat," ungkap Ngurah Arda di Denpasar, Minggu (29/1).

Bagaimana kalau tidak ada LPJ hibah, tapi dananya sudah digunakan? "Kalau tidak ada LPJ, tim pengawas dari Inspektorat Provinsi Bali yang akan menanganinya. Sejauh ini, kami di Biro Keuangan menanganinya pencairan dana hibah dan menerima LPJ-nya. Jadi, kalau ada pelanggaran mekanisme di lapangan, Tim Inspektorat yang punya kewenangan," tegas mantan Penjabat Bupati Karangasem periode Juli 2015 hingga Februari 2016 ini.

Ngurah Arda menyebutkan, sebelum Tim Sapu Jagat dari Inspektorat Provinsi Bali diterjunkan kejar LPJ

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Senin, 30 Januari 2017

Hal : 1



Pemprov Ancam Tarik Kembali Bantuan Hibah

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

hibah tahun 2016, Biro Keuangan baru menerima setoran 1.159 LPJ dari total 5.278 proposal yang diajukan ke Pemprov Bali. "Setelah Tim Sapu Jagat diterjunkan Inspektorat, saya belum mengecek kembali berapa LPJ yang sudah masuk lagi," papar Ngurah Arda yang notabene mantan Kepala Bagian Urusan Rumah Tangga Setda Provinsi Bali.

Sementara itu, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali juga mengerahkan 109 personel untuk mengejar LPJ hibah ke kelompok masyarakat penerima dana bansos. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, I Wayan Suarjana, mepetnya waktu penyerahan LPJ hibah yang di-dedaline sampai 31 Januari 2017 besok, memaksa pihaknya harus kejar-kejaran dengan waktu.

"Kita kejar-kejaran dengan waktu, karena batas waktunya 31 Januari 2017 bagi semua penerima hibah untuk serahkan LPJ," ujar Suarjana saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah,

Minggu kemarin. Suarjana menegaskan, 109 personel yang dikerahkannya bergabung ke Sapu Jagat Inspektorat Provinsi Bali itu merupakan gabungan dari beberapa bagian di DPRD Bali.

"Ada dari bagian umum, bagian keuangan, dan bagian persidangan DPRD Bali. Kita gabungkan dan mereka punya batas waktu mengumpulkan LPJ hibah sampai 31 Januari 2017. Sekarang mereka sedang turun ke desa-desa," ungkap birokrat asal Banjar Kuta Bali, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Tabanan ini.

Menurut Suarjana, 109 personel---Tim 109---yang diterjunkannya ini tersebar secara acak di setiap kecamatan se-Bali (total mencapai 57 kecamatan). "Karena mepetnya waktu penyetoran LPJ ini, tim yang turun ke desa-desa harus lembur. Mereka nggak libur walaupun masa liburan," tegas Suarjana yang mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali.

Dari hasil turun ke desa-desa, kata Suarjana, ada yang sudah mengerjakan LPJ, ada

yang sudah kelar 100 persen, namun baru akan menyetorkan LPJ hibah. "Kalau pengumpulan data sementara, semua yang kami temui sudah terealisasi dananya dan dilaksanakan secara fisik. Kami ada batas waktu sampai besok (hari ini) untuk turun," kata Suarjana.

Dihubungi terpisah, Minggu kemarin, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng, yang sekaligus Ketua Tim Sapu Jagat, mengatakan batas waktu penyetoran LPJ hibah adalah 31 Januari 2017. "Berapa total LPJ hibah yang berhasil dikumpulkan, baru akan dipastikan hari Selasa (31 Januari 2017). Saat ini, semua personel Tim Sapu Jagat masih di lapangan," tandas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Tim Sapu Jagat Inspektorat Provinsi Bali yang dikerahkan kejar LPJ hibah itu sendiri berkekuatan 1.014 personel. Sebelum terjun ke lapangan, mereka sempat dikumpulkan di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (24/1) lalu, untuk mendapatkan briefing dari Ketut Teneng.

"Mereka (Tim Sapu Jagat

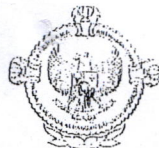
berkekuatan 1.014 personel Red) juga yang sejak awal mengawasi proses pencairan dana hibah Pemprov Bali dari APBD 2016 senilai Rp 403 miliar tersebut," ujar Ketut Teneng di sela-sela acara briefing hari itu.

Menurut Teneng, sesuai briefing hari itu, Tim Sapu Jagat sudah mulai terjun ke kelompok-kelompok masyarakat penerima hibah untuk kejar LPJ. Tim Tim Sapu Jagat berkekuatan 1.014 personel ini dibagi untuk 50 desa. Mereka yang sebelumnya digembleng khusus menangani masalah dana hibah ini, harus mengecek pelaksanaan (peruntukan) hibah di lapangan.

Mereka harus mengecek fisik dan pencocokan realisasi hibah di lapangan, termasuk juga mengejar supaya LPJ segera disetor. Juga harus dilakukan pencocokan peruntukan anggaran hibah. "Misalnya, pengajuan hibah yang semula untuk pembangunan Bale Kulkul, tapi di lapangan ternyata untuk pembangunan tembok penyengker. Itu salah, nggak boleh," tegas Teneng. **nat**

Edisi : Senin, 30 Januari 2017

Hal : 15



Setelah Program JKBM Terintegrasi ke JKN Pemprov Tetap Rogoh Rp 110 M



Gubernur Pastika di Lapangan Niti Mandala Denpasar, Minggu (29/1).

DENPASAR, NusaBali
Terintegrasinya program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bukan berarti Pemprov Bali tidak keluar dana urusan kesehatan masyarakat. Pemprov Bali tetap harus merogoh kocek Rp 110 miliar dari APBD 2017 untuk buat mensubsidi krama Bali yang belum masuk daftar Penerima

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Pemprov Tetap Rogoh Rp 110 M

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Bantuan Iuran (PBI).

Kadis Kesehatan Provinsi Bali, dr I Ketut Suarjaya, mengatakan Pemprov Bali masih anggarkan Rp 110 miliar di APBD 2017 untuk membayar premi 400.749 krama yang belum masuk PBI. Premi dengan asumsi sebesar Rp 23.000 per orang sebulan bagi krama yang belum mendapatkan PBI ini berlaku untuk di luar Kabupaten Badung.

"Khusus Kabupaten Badung, kita tidak anggarkan karena di sana sudah ada KBS (Kartu Badung Sehat). Di luar Badung, ada 400.749 krama yang belum tercover PBI. Nah, Pemprov Bali membayarkan Rp 110 miliar dari dana APBD 2017 untuk premi mereka," ujar dr Ketut Suarjaya di Denpasar, Minggu (29/1).

Menurut dr Suarjaya, ketika masih diberlakukannya JKBM, Pemprov Bali harus mengeluarkan dana sekitar Rp 200 miliar per tahun buat membayar biaya pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Bali. Jumlah Rp 200 miliar tersebut belum termasuk tambahan (sharing) dengan Kabupaten/Kota se-Bali yang jumlahnya mencapai total (Pemprov Bali + Kabupaten/Kota) Rp 390 miliar.

"Kalau sharing dengan Kabupaten/Kota, dana JKBM total Rp 390 miliar per tahun. JKBM berlaku di seluruh Kabupaten/Kota, di mana masyarakat tidak bayar iuran apa pun. Tapi sekarang, kita harus mengikuti mekanisme aturan dari pusat (JKBM terintegrasi ke JKN, Red)," tandas dr Suarjaya.

Dengan terintegrasinya JKBM ke JKN, kata Suarjaya, penggunaan anggaran dari APBD Bali memang lebih hemat hampir Rp 90 miliar per tahun. Namun, masyarakat Bali cenderung bermemori dan menginginkan JKBM. "Mungkin karena ditanggung penuh atau tidak bayar iuran kali ya?" kelakar birokrat asal Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.

Suarjaya menambahkan, dari kriteria WHO (World Health Organization), negara wajib memberikan tanggung kesehatan bagi warganya yang berpenghasilan rendah minimal sampai 40 persen dari jumlah penduduk. Saat ini, penduduk Bali mencapai 4,2 juta jiwa. Kalau 40 persennya, berarti ada 1,6 juta jiwa yang seharusnya ditanggung pemerintah.

Dari 1,6 juta jiwa penduduk Bali ini, kata Suarjaya, ada yang sudah mendapatkan

PBI dari pemerintah pusat. "Yang belum menerima PBI dari pusat itulah yang kita subsidi," tegas Suarjaya.

Sementara itu, Gubernur Made Mangku Pastika meminta masyarakat Bali segera mengurus kartu terkait dengan terintegrasinya JKBM ke JKN. Dengan terintegrasinya JKBM ke JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2017, maka otomatis kartu JKBM tidak dapat digunakan lagi untuk berobat.

"Makanya, pemegang kartu JKBM harus mengurus pergantiannya ke dalam kartu JKN," ujar Gubernur Pastika saat berorasi di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (29/1) pagi.

Pastika menyatakan, Pemprov Bali tahun ini tetap mengalokasikan anggaran mencapai Rp 110 miliar untuk pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu dan namanya tidak termasuk dalam daftar sebagai PBI. Pastika pun meminta para aparat desa untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pengintegrasian JKBM ke JKN tersebut, sehingga tidak

terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Saya minta masyarakat segera mengurus penggantian kartu JKBM ke dalam JKN. Sedangkan aparat desa aktif sosialisasikan dan segera mendaftarkan warganya yang tidak mampu dan tidak masuk daftar PBI ke Dinas Sosial, sehingga iuran BPJS mereka bisa dibayarkan oleh Provinsi," ujar mantan Kapolda Bali berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Purn) ini.

Menurut Pastika, semua elemen masyarakat juga harus jemput bola. "Jangan menunggu sakit dulu, baru buat kartu. Sediakan payung sebelum hujan," Pastika mengingatkan. Di samping, para petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit juga diminta jangan terlalu 'saklek' kepada pasien yang memang memerlukan penanganan, tapi belum memiliki kartu JKN.

"Saya harapkan semua pihak turut bersama-sama mengawal proses pengintegrasian JKM ke JKN ini, jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sedang sakit dan memerlukan perawatan," tandas Gubernur Bali asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. nat

Edisi : Senin, 30 Januari 2017

Hal : 1 dan 15